



## Komunikasi Krisis dalam Isu Kebangsaan (Studi Kasus Peran Pemerintah dalam Menjaga Pancasila)

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>1\*</sup>, Ashfiya Nur Atqiya<sup>2</sup>,  
Atikah Firdaus<sup>3</sup>, Zaky Amrullah Zain<sup>4</sup>, Robith Taufiqurrahman<sup>5</sup>, Aulia Ashari<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

<sup>3,4,5,6</sup> Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: [mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id)<sup>1\*</sup>; [firdausatikah5@gmail.com](mailto:firdausatikah5@gmail.com)<sup>2</sup>;  
[ashfiy.anura@gmail.com](mailto:ashfiy.anura@gmail.com)<sup>3</sup>; [zakkyamrullah914@gmail.com](mailto:zakkyamrullah914@gmail.com)<sup>4</sup>; [robithrobith9@gmail.com](mailto:robithrobith9@gmail.com)<sup>5</sup>;  
[auliaazhari0803@gmail.com](mailto:auliaazhari0803@gmail.com)<sup>6</sup>

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis: [mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to analyze the crisis communication strategy implemented by the government to address national issues that could put the ideology of Pancasila at risk. Using a case study approach, this study examines how the government managed communication during the crisis, including identifying key stakeholders, transferring messages, and using communication channels. This data was collected by analyzing political documents and media reports also library research. The results show that the effectiveness of government crisis communication is greatly influenced by the speed of response, transparency of information, and the ability to build an integrated dialog with different groups of people. In addition, this research also shows the importance of positive and continuous communication to incorporate state resistance to ideological threats. The effectiveness of this research provides the government and other interest groups with valuable findings in the development of effective communication strategies to maintain and strengthen the value of Pancasila on the issue of time challenges.*

**Keywords:** *Communication, Pancasila, Role of Government*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah nasional yang dapat menempatkan ideologi Pancasila dalam risiko. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, studi ini meneliti bagaimana pemerintah mengelola komunikasi selama krisis, termasuk mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, mentransfer pesan, dan menggunakan saluran komunikasi. Data ini dikumpulkan dengan menganalisis dokumen politik dan laporan media serta library reserch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi krisis pemerintah sangat dipengaruhi oleh kecepatan respons, transparansi informasi, dan kemampuan untuk membangun dialog terpadu dengan berbagai kelompok orang. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi positif dan berkelanjutan untuk memasukkan resistensi negara terhadap ancaman ideologis. Efektivitas penelitian ini memberikan pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya dengan temuan berharga dalam pengembangan strategi komunikasi yang efektif untuk mempertahankan dan memperkuat nilai Pancasila tentang masalah tantangan waktu.

**Kata Kunci:** Komunikasi, Peran Pemerintah, Pancasila

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam sejarah, Pancasila muncul dan hadir sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kompleksitas multikultural, begitu pula perkembangan makna Pancasila sebagai pandangan kehidupan berbagai generasi (Kaelan, 2013). Secara etimologis, Pancasila

berasal dari bahasa sansekerta, Panca berarti lima dan sila berarti dasar, praktisnya Pancasila berarti suatu ideologi yang terdiri dari lima dasar (Koentjaraningrat, 2002)

Keberadaan Pancasila menjadi landasan ideologi yang mutlak, artinya tidak dapat diganggu gugat (Kusuma, 2011) Karena secara historis, proses merancang Pancasila sebagai dasar negara diwarnai dengan perdebatan yang begitu sengit di Badan Penyelidik Usaha usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan pada akhirnya Pancasila bisa disepakati bersama dan didasari dengan menjunjung tinggi keadilan dari berbagai keberagaman, mulai dari berbagai agama, ras, suku, dan bahasa sehingga Pancasila muncul sebagai suatu wadah yang mempersatukan diatas keberagaman. (Atar et al., 2022)

Dalam menjaga ideologi Pancasila, pemerintah memiliki peran krusial sebagai suatu dasar berbangsa dan bernegara, serta sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah yang mengatur berjalannya system kenegaraan dengan kerjasama yang baik bersama rakyat (Gonggong, 2005).

Di era digital dan globalisasi yang semakin pesat, tantangan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak signifikan terhadap pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam penyebaran informasi yang tidak selalu benar dan berpotensi memicu krisis kebangsaan. Isu-isu seperti disintegrasi moral, hoaks, dan pergeseran nilai akibat pengaruh budaya asing menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam konteks ini, komunikasi krisis menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mengelola dan merespons berbagai ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ideologi Pancasila melalui kebijakan komunikasi yang efektif, edukasi publik, serta penguatan kurikulum pendidikan moral dan kebangsaan. Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, tetap memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila di tengah arus perubahan yang begitu cepat.

Krisis dalam isu kebangsaan sering kali menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas negara, terutama ketika berkaitan dengan kebijakan publik dan distribusi barang pemerintah. Dalam situasi seperti ini, komunikasi krisis memainkan peran yang sangat penting dalam meredam keresahan masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan, termasuk Pancasila, tetap dijunjung tinggi dalam penyelesaian konflik. Komunikasi yang tidak efektif dalam menangani krisis dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat, memperburuk permasalahan, dan bahkan mengancam kohesi sosial yang telah dibangun dalam bingkai persatuan Indonesia.

Dalam konteks kebijakan publik, distribusi barang pemerintah—baik itu bantuan sosial, subsidi, atau alat kesehatan dalam situasi darurat—sering kali menjadi sumber polemik jika tidak dikelola dengan baik. Masalah transparansi, efektivitas distribusi, dan persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah sering kali menimbulkan krisis kepercayaan. Isu-isu seperti dugaan korupsi, ketidakadilan dalam alokasi, serta penyalahgunaan wewenang dapat memperparah situasi dan memicu respons negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi krisis yang strategis dan berbasis pada prinsip-prinsip kebangsaan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.

Pancasila sebagai ideologi negara memberikan landasan fundamental dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam strategi komunikasi krisis. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan menjadi pedoman utama dalam menyusun narasi yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa komunikasi yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membangun solidaritas dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan demikian, strategi komunikasi yang efektif dapat membantu mencegah eskalasi krisis dan memastikan bahwa solusi yang diambil tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi krisis yang digunakan dalam penanganan isu kebangsaan terkait distribusi barang pemerintah. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah mengelola komunikasi dalam menghadapi tantangan kebijakan publik yang kontroversial, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam proses tersebut. Dengan memahami dinamika komunikasi krisis dalam konteks kebangsaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani isu-isu serupa di masa mendatang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis dalam penelitian ini bertumpu pada pendekatan komunikasi politik dan sosiologi komunikasi. Komunikasi politik digunakan untuk menelaah bagaimana pemerintah menyampaikan kebijakan serta merespons isu-isu kebangsaan melalui strategi komunikasi yang transparan dan partisipatif. Dalam kerangka ini, pemerintah berperan sebagai aktor utama yang tidak hanya mengatur informasi, tetapi juga membangun dialog yang konstruktif dengan publik guna menjaga stabilitas ideologis. Sementara itu, sosiologi komunikasi digunakan untuk memahami dinamika sosial yang muncul dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam menyikapi krisis yang berpotensi

melemahkan nilai-nilai Pancasila. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, strategi komunikasi krisis diposisikan sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial dan memastikan nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai strategi komunikasi krisis pemerintah dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah kompleksitas tantangan kebangsaan dan kemajuan teknologi informasi (Palinggi & Ridwany, 2020). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial secara lebih komprehensif melalui analisis terhadap fenomena, narasi, dan makna yang berkembang dalam konteks komunikasi pemerintahan (Bungin, 2011).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, artikel media, serta dokumentasi online yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui identifikasi, klasifikasi, dan sintesis informasi yang berkaitan dengan topik penelitian (Ashari & Najicha, 2023a)

Dalam pelaksanaannya, proses analisis data dilakukan melalui pendekatan evaluatif dan komparatif. Evaluasi dilakukan terhadap relevansi kebijakan pemerintah dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, sementara pendekatan komparatif digunakan untuk melihat efektivitas berbagai strategi komunikasi yang telah diterapkan dalam situasi krisis. Penelitian ini juga menganalisis keterkaitan antara prinsip-prinsip dasar Pancasila dengan komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam isu distribusi barang negara dan respons terhadap ancaman ideologis (Firdausi, 2020)

Selain itu, landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan komunikasi politik dan sosiologi komunikasi, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi, transparansi kebijakan, dan dialog aktif antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas strategi komunikasi pemerintah dalam mempertahankan eksistensi ideologi Pancasila sebagai dasar negara (Yuriska; Marwan, 2017).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat dalam menjaga Pancasila dengan memastikan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan bagi seluruh rakyat. Sebagai penyeimbang kepentingan berbagai kelompok, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang adil dan inklusif. Sejalan dengan konsep "the servant state" dari Mulgan (2006), pemerintah bertanggung jawab menjaga stabilitas sosial, melindungi hak warga, serta mencegah dominasi atau eksploitasi oleh kelompok tertentu. Dengan demikian, pemerintah harus menegakkan nilai demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial guna menjaga harmoni dalam kehidupan bernegara. (Suwarsono, 2012)

Dalam memahami opini publik, pemerintah harus menghindari reduksionisme dan tidak hanya berpegang pada suara mayoritas. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah menyeimbangkan berbagai kepentingan demi stabilitas sosial dan mencegah dominasi kelompok tertentu yang dapat mengganggu keharmonisan bangsa. (Nimmo Dan, 2001). Dalam demonstrasi antikorupsi 2009, penting bagi pemerintah untuk mengelola aspirasi masyarakat secara bijak agar tidak disusupi kepentingan tertentu. Stabilitas politik berbasis demokrasi Pancasila harus mampu merespons tantangan, termasuk pengaruh budaya dan mistisisme, demi memperkuat legitimasi pemerintahan. (Bubandt Nils, 2016)

Di tengah tantangan globalisasi dan dinamika sosial politik mencakup penegakan hukum terhadap tindakan yang melecehkan Pancasila serta menjaga stabilitas sosial dari kepentingan politik tertentu. Selain itu, pemerintah perlu mengadaptasi kebijakan di era digital untuk memastikan pemahaman dan praktik Pancasila tetap relevan. Peran pemerintah tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga menciptakan kesadaran masyarakat agar menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral dan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat. (Masduki, 2017)

Pancasila menjadi pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan publik yang berlandaskan keadilan sosial dan kemanusiaan (A. Muhamad et al., 2025). Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus berupaya memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam tatanan hukum dan kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tercermin dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Prinsip demokrasi Pancasila juga menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas (Kusuma, 2011a).

Penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan, termasuk globalisasi, disrupsi digital, serta infiltrasi ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, masih terdapat kendala dalam implementasi hukum yang mencerminkan nilai Pancasila secara konsisten. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi hukum yang berkelanjutan, memperkuat peran pendidikan dalam menanamkan nilai Pancasila, serta mengoptimalkan media digital dalam menyebarkan pemahaman ideologi negara. (Swasono, 2016)

Penelitian ini membahas strategi komunikasi yang digunakan oleh pemerintah dalam menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Studi ini menyoroti bagaimana pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat dalam menghadapi tantangan ideologis serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kebijakan nasional (A. Muhamad et al., 2025), sebagai berikut :

### **Peran Pemerintah dalam Komunikasi Kebangsaan**

Pemerintah berperan sebagai mediator dalam menjaga stabilitas ideologi Pancasila dengan memastikan bahwa komunikasi kebangsaan dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Menurut (MD. Mahfud, 2011) strategi komunikasi yang diterapkan pemerintah harus mencerminkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Peran pemerintah dalam komunikasi kebangsaan sangat krusial untuk menjaga persatuan dan keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan komunikasi politik yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan. Hal ini dilakukan dengan membangun simbol komunikasi yang positif sebagai referensi dalam komunikasi publik, sehingga tidak memperlemah sendi-sendi persatuan nasional. (Yuriska; Marwan, 2017)

Dalam konteks kepemimpinan nasional, seorang pemimpin negara memiliki peran sebagai komunikator politik utama yang harus mampu mengelola opini publik secara efektif. Presiden, misalnya, diharapkan untuk terus membangun imajinasi politik yang dapat menginspirasi dan mempersatukan seluruh elemen bangsa, termasuk yang berseberangan secara politik (A. Muhamad, Nur, Ifada, et al., 2024)

Selain itu, pemerintah juga harus menghadapi tantangan dalam komunikasi politik, seperti pengaruh media sosial yang dapat memecah belah masyarakat melalui penyebaran isu-isu yang tidak berbasis fakta. Oleh karena itu, komunikasi kebangsaan yang dibangun oleh pemerintah harus diarahkan untuk meredakan potensi konflik dan memperkuat rasa persatuan.

Pemerintah juga memiliki peran dalam memastikan komunikasi politik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan membangun citra kepemimpinan yang inklusif dan tidak menjaga jarak dengan rakyat, pemerintah dapat menciptakan ruang dialog yang lebih efektif dan demokratis. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi dan pemerintahan yang bersih serta bebas dari intervensi politik yang berlebihan (A. Muhamad, Nur, Arista, et al., 2024)

Dengan demikian, komunikasi kebangsaan yang dikelola pemerintah harus menjadi alat untuk memperkuat harmoni sosial, menghindari polarisasi politik, serta membangun kesadaran bersama akan pentingnya keberagaman sebagai modal utama dalam pembangunan bangsa.

### **Implementasi Komunikasi Krisis dalam Menjaga Pancasila**

Dalam menghadapi isu yang berpotensi mengancam ideologi negara, pemerintah menerapkan strategi komunikasi krisis dengan pendekatan berbasis dialog dan edukasi masyarakat. Ditekankan bahwa komunikasi pemerintah dalam situasi krisis harus mempertahankan keseimbangan antara respons cepat dan akurasi informasi untuk menghindari kesalahpahaman publik. (Ashari & Najicha, 2023b)

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya diwujudkan dalam sistem hukum, tetapi juga harus diaktualisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu strategi yang digunakan pemerintah dalam menjaga dan mengaktualisasikan Pancasila adalah melalui komunikasi publik, khususnya dengan memanfaatkan media sosial di era digital.

Menurut Firdausi (2020) Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Komunikasi, komunikasi pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perubahan sosial akibat perkembangan teknologi informasi. Media sosial telah menjadi

alat komunikasi massa yang memungkinkan pemerintah untuk menyebarluaskan gagasan dan nilai-nilai Pancasila secara cepat, luas, dan interaktif.

Salah satu bentuk implementasi komunikasi pemerintah dalam menjaga Pancasila adalah kampanye digital seperti slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila". Kampanye ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat dengan cara yang lebih dekat dengan keseharian mereka. Dalam perspektif sosiologi komunikasi, kampanye ini menciptakan ruang interaksi sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi, memberikan tanggapan, serta menginternalisasi nilai-nilai yang dikomunikasikan.

Namun, tantangan dalam aktualisasi Pancasila melalui media sosial juga cukup besar. Salah satunya adalah potensi misinterpretasi dan perbedaan sudut pandang yang dapat menciptakan disharmoni sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan bersifat inklusif, mendidik, dan mendorong dialog yang sehat agar nilai-nilai Pancasila dapat dipahami dan diterapkan secara substansial, bukan sekadar menjadi simbol atau slogan semata.

Dengan demikian, komunikasi pemerintah melalui media sosial menjadi instrumen penting dalam menjaga eksistensi dan relevansi Pancasila di era digital. Pemanfaatan strategi komunikasi yang efektif akan membantu membangun masyarakat yang pancasilais dan mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Tantangan dalam Komunikasi Pemerintah**

(Soepomo, 1960) mengidentifikasi beberapa tantangan dalam komunikasi pemerintah, termasuk disinformasi di media sosial, polarisasi politik, serta rendahnya partisipasi publik dalam memahami nilai-nilai Pancasila. Tantangan ini memerlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif dan inklusif. Tantangan komunikasi politik pemerintah Indonesia dalam negara kesejahteraan mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi, partisipasi publik, hingga efektivitas penyampaian kebijakan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana pemerintah dapat membangun komunikasi yang inklusif di tengah kompleksitas sosial dan politik pasca-reformasi 1998.

Dalam konteks demokrasi, komunikasi politik yang dulunya bersifat otoritatif dan terpusat kini harus bertransformasi menjadi lebih terbuka, demokratis, dan partisipatif. Namun, perubahan ini juga diiringi dengan tantangan dalam menjangkau seluruh elemen

masyarakat, mengelola perbedaan opini, serta menghadapi pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat. Selain itu, pemerintah juga harus mampu mengelola ekspektasi publik terhadap kinerja politik dan ekonomi, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. Kegagalan dalam komunikasi politik dapat berujung pada ketidakpercayaan publik, lemahnya legitimasi kebijakan, dan meningkatnya potensi konflik sosial, yang pada akhirnya menghambat pembangunan negara kesejahteraan yang dicita-citakan.(Abdussamad, 2008)

### **Strategi Penguatan Komunikasi Pemerintah**

Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam menjaga Pancasila, diperlukan beberapa langkah strategis, di antaranya:

#### **a. Mengoptimalkan penggunaan media digital untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila.**

Dalam menghadapi tantangan era digital, optimalisasi media digital menjadi kunci dalam menjaga dan menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Menurut Salsabilah et al., (2025) meskipun teknologi digital memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme di media sosial dapat mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, literasi digital berbasis Pancasila menjadi langkah strategis dalam membentuk masyarakat yang kritis, bertanggung jawab, dan beretika dalam berinteraksi di dunia maya (Nur et al., 2024). Selain itu, penguatan regulasi yang mendukung etika digital serta edukasi budaya yang menanamkan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara positif. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan digital, Indonesia dapat menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat identitas kebangsaan di tengah arus globalisasi yang semakin pesat.

#### **b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui diskusi publik dan program edukasi kebangsaan(Jamaluddin et al., 2019)**

Keterlibatan masyarakat dalam diskusi politik dan program edukasi kebangsaan memainkan peran penting dalam memperkuat partisipasi politik dan kesadaran demokrasi. Pendidikan politik yang efektif dapat meningkatkan pemahaman warga negara tentang hak dan kewajiban mereka, mendorong partisipasi aktif dalam proses politik, dan memperkuat fondasi demokrasi(A. M. N. Muhamad et al., 2024). Program

edukasi yang menargetkan generasi muda, seperti pelatihan dan lokakarya, telah terbukti meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan mereka dalam pemilihan umum. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai platform untuk kampanye edukasi politik dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mendorong diskusi yang lebih inklusif. Dengan demikian, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan partisipasi politik tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih sadar dan kritis terhadap isu-isu kebangsaan. (Pratama et al., 2024)

**c. Mengembangkan narasi kebangsaan yang lebih inklusif dan menarik bagi generasi muda**

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga Pancasila melalui strategi komunikasi yang efektif. Dengan memastikan keterbukaan informasi, membangun dialog dengan masyarakat, serta mengadaptasi strategi komunikasi terhadap perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila dapat terus dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Zainal & Sarwoprasodjo, 2018)

Pengembangan narasi kebangsaan yang inklusif dan menarik bagi generasi muda merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan strategis dan adaptif. Generasi Z, yang tumbuh dalam era digital, memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh teknologi dan akses informasi tanpa batas. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap multikulturalisme dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Oleh karena itu, narasi kebangsaan harus disampaikan melalui media digital yang mereka gunakan sehari-hari, seperti media sosial dan platform online lainnya. (Rafiq, et al., 2024)

Pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai kebangsaan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk identitas nasional yang kuat. Sekolah dan lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, regional, dan nasional dalam kurikulum mereka. Dengan demikian, generasi muda dapat memahami dan menghargai keragaman budaya Indonesia, yang pada gilirannya memperkuat rasa kebangsaan mereka.

Selain itu, penggunaan produk kreatif dan budaya populer dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan rasa nasionalisme. Misalnya, desain fashion yang menggabungkan elemen tradisional dengan tren modern dapat menarik minat generasi muda sekaligus memperkenalkan mereka pada warisan budaya bangsa. Pendekatan ini

tidak hanya meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal tetapi juga membangun identitas nasional yang relevan dengan zaman.

Dengan memanfaatkan teknologi digital, pendidikan karakter, dan produk kreatif, narasi kebangsaan dapat dikemas secara inklusif dan menarik bagi generasi muda. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beragam dan kaya budaya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila melalui strategi komunikasi yang efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi krisis sangat bergantung pada kecepatan respons, transparansi informasi, dan kemampuan pemerintah dalam membangun dialog yang inklusif. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, disrupsi digital, serta penyebaran ideologi asing, pemerintah perlu mengadaptasi kebijakan dan strategi komunikasi yang lebih inovatif untuk memastikan bahwa pemahaman dan penerapan Pancasila tetap relevan di era modern.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga Pancasila. Program edukasi kebangsaan, penggunaan media digital secara efektif, serta penguatan regulasi hukum berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, melalui strategi komunikasi yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Pancasila, pemerintah dapat memperkuat ketahanan ideologi negara serta memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdussamad, Z. (2008). Tantangan dan prospek komunikasi politik Indonesia dalam negara kesejahteraan.
- Ashari, F. A., & Najicha, F. U. (2023a). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam era digital. *Research Gate*, 4(1), 2–15.
- Ashari, F. A., & Najicha, F. U. (2023b). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam era digital. *Research Gate*, 4(1), 2–15.

- Atar, A., Dewata, A. N., Fairuzabadi, M., Fitriyono, & Riska Andi. (2022). Tantangan dan relevansi Pancasila bagi generasi milenial dan Z. *Intelektiva*, 4(4), 1–5.
- Bubandt, N. F. A. (2016). *Demokrasi, korupsi, dan makhluk halus dalam politik Indonesia kontemporer (Edisi Pert.)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bungin, B. (2011). Masyarakat Indonesia kontemporer dalam pusaran komunikasi. *Jurnal Aspikom*, 1(2), 125–136.
- Daffa, D. R., Arthuro, D., Fernanda, J. A., & Pratama, M. B. W. (2024). Gen-Z: Eksplorasi identitas budaya dan tantangan sosial dalam era digital. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 169–183. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i2.3112>
- Firdausi, I. (2020). Kebijakan pemerintah dalam aktualisasi Pancasila melalui media sosial ditinjau dari perspektif sosiologi komunikasi.
- Gonggong, A. (2005). *Indonesia dalam arus sejarah*. Yayasan Obor.
- Jamaluddin, Y., Fitriani, F., Safrida, S., & Warjio, W. (2019). Strategi dan model pemberdayaan masyarakat miskin di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2231>
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila. Paradigma*.
- Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Gramedia.
- Kusuma, A. (2011b). *Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusuma. (2011a). *Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud, M. D. (2011). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Rajawali Press.
- Masduki, A. S. M. (2017). *Pancasila dalam pusaran globalisasi*. LKIS.
- Muhamad, A. M. N., Nur, A. A., Zahra, A. P. A., Allifah, L. A., & Norhalisa, S. (2024). Pancasila sebagai dasar negara dan hukum internasional: Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 151–159. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1107>
- Muhamad, A., Nasoha, M., Amrulloh, M. F., & Nafi, A. T. (2025). Pancasila as the basis for constitutional law in Indonesia: Implications and implementation. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan*, 2(1), 74–82.
- Muhamad, A., Nur, A. A., Arista, A. W., Wulandari, R., Muhamad, R. S. T., & Nugraheni, A. (2024). Peran Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dinamika sejarah dan perkembangannya. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 379–395. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i4.1379>
- Muhamad, A., Nur, A. A., Ifada, A., Eka, B. S., & Yunda, M. S. (2024). Hak kewarganegaraan dan kebijakan pemerintah: Evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Konsensus: *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 01–10.  
<https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.437>

- Nimmo, D. (2001). *Komunikasi politik khalayak dan efek* (Cet. 3). Remaja Rosdakarya.
- Nur, A. A., Muhamad, A. M. N., Tabarok, N., Nuha, M. M., & Wafiyur, H. R. (2024). Hak-hak kewarganegaraan dalam kerangka negara hukum: Kajian teoretis dan praktis di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 5(1), 45–54.  
<https://doi.org/10.55606/cendekia.v5i1.3362>
- Palinggi, S., & Ridwany, I. (2020). Peran nilai-nilai moral Pancasila dalam kemajuan teknologi di era milenium. *Pendidikan Bela Negara*, 48, 53.
- Pratama, I., Hadi, A., & Umami, R. (2024). Penguatan partisipasi politik inklusif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan Generasi Z pada Pemilu 2024 di Desa Bagik Polak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*.  
<https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/index>
- Salsabilah, T., Savitri, N. D., Putri, A. L., Sari, D. P., Annaufal, R., & Ghani, Y. A. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam era digital. *Jurnal Riset Manajemen*, 3(1), 130–138. <https://doi.org/10.54066/jurma.v3i1.2973>
- Soepomo. (1960). *Sistem hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II*. Balai Pustaka.
- Suwarsono, M. (2012). *Strategi pemerintah*. Erlangga.
- Swasono, E. (2016). *Pancasila: Jalan keadilan sosial*. Yayasan Obor Indonesia.
- Yuriska, & Marwan, A. (2017). *Komunikasi politik dan pembangunan daerah* (D. H. A. K. Santoso, Ed.; 1st ed.). Buku Litera Yogyakarta.
- Zainal, A. G., & Sarwoprasodjo, S. (2018). Strategi komunikasi politik pemerintahan daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan (Studi Program “Bupati Ronda” di Kabupaten Lampung Tengah). *Journal of Communication Studies*, 3(1), 54–66.